



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH TELUK BONE

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT  
KETERANGAN GAMBAR  
SKALA 1:500.000

**Batas Wilayah Perencanaan**

- Garis Pantai
- Batas Wilayah Perencanaan

**Batas Wilayah Provinsi**

- Batas Wilayah Provinsi

**Alur Migrasi Biota Laut**

- Alur Migrasi Hiu Paus
- Alur Migrasi Tuna
- Alur Migrasi Cakalang

Singkatan

- P. = Pulau
- Tg. = Tanjung
- PL. = Pelabuhan Laut
- PP. = Pelabuhan Perikanan

**RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT**

**Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Laut**

Sistem Jaringan Transportasi

- ⚓ Tatanan Kepelabuhanan Nasional

**Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan**

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- 📍 Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/Atau Perikanan Budi Daya
- ⚓ Pelabuhan Perikanan

**Keterangan Peta**

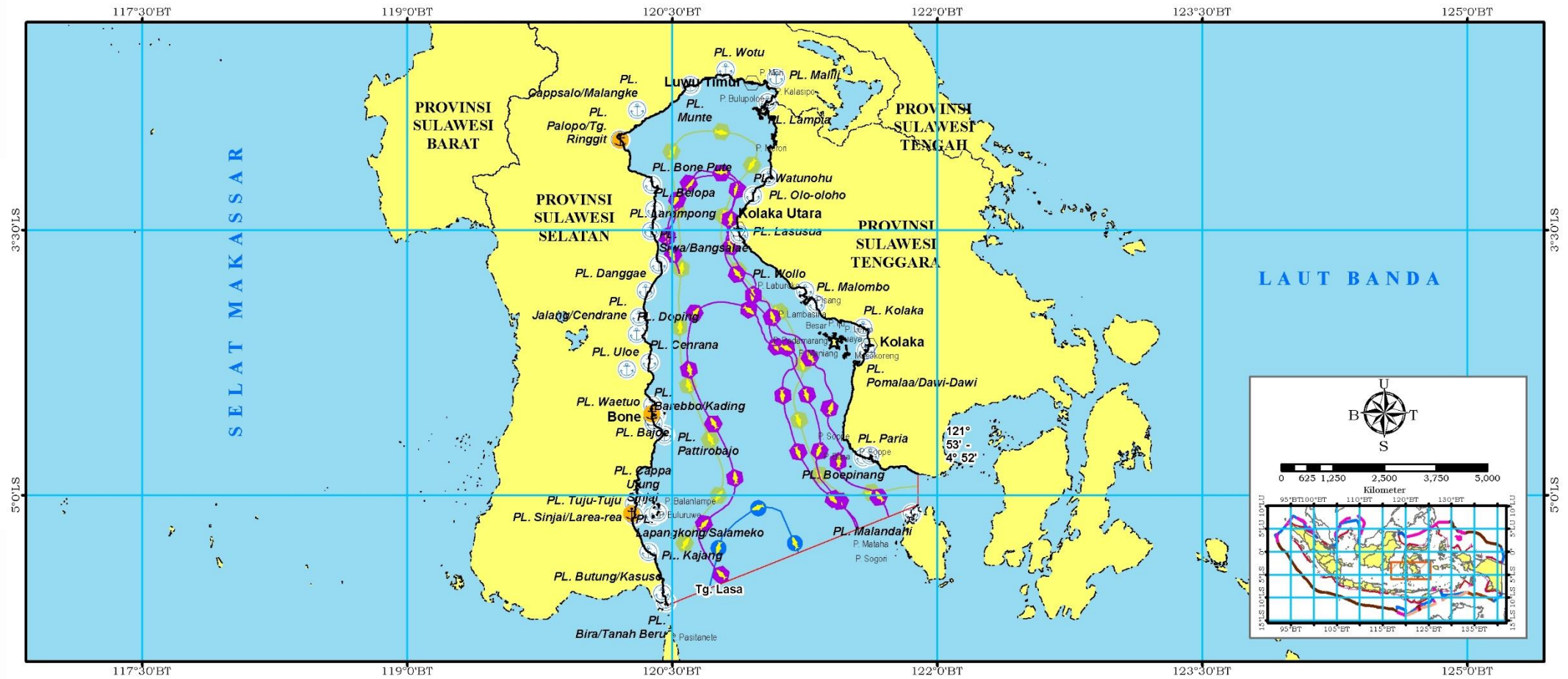
- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Skala ketelitian dalam peta ini 1:500.000. Peta ini dicetak sesuai dengan format lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

**Sumber Peta**

- Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- *Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi ketiga tahun 1953 dan *Draft Special Publication S-23 Name and Limit of Ocean and Seas* edisi keempat tahun 2002 yang diterbitkan oleh *International Hydrographic Organization*.



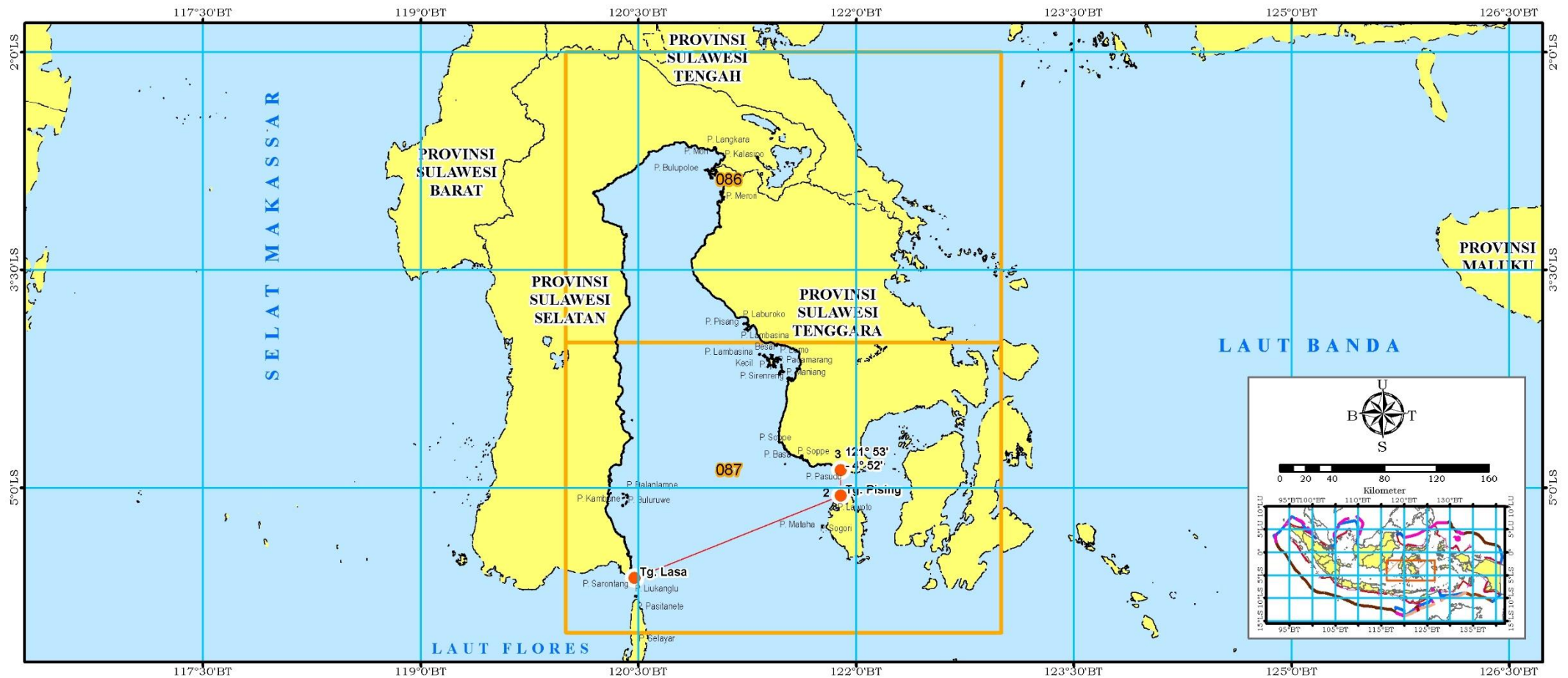
PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

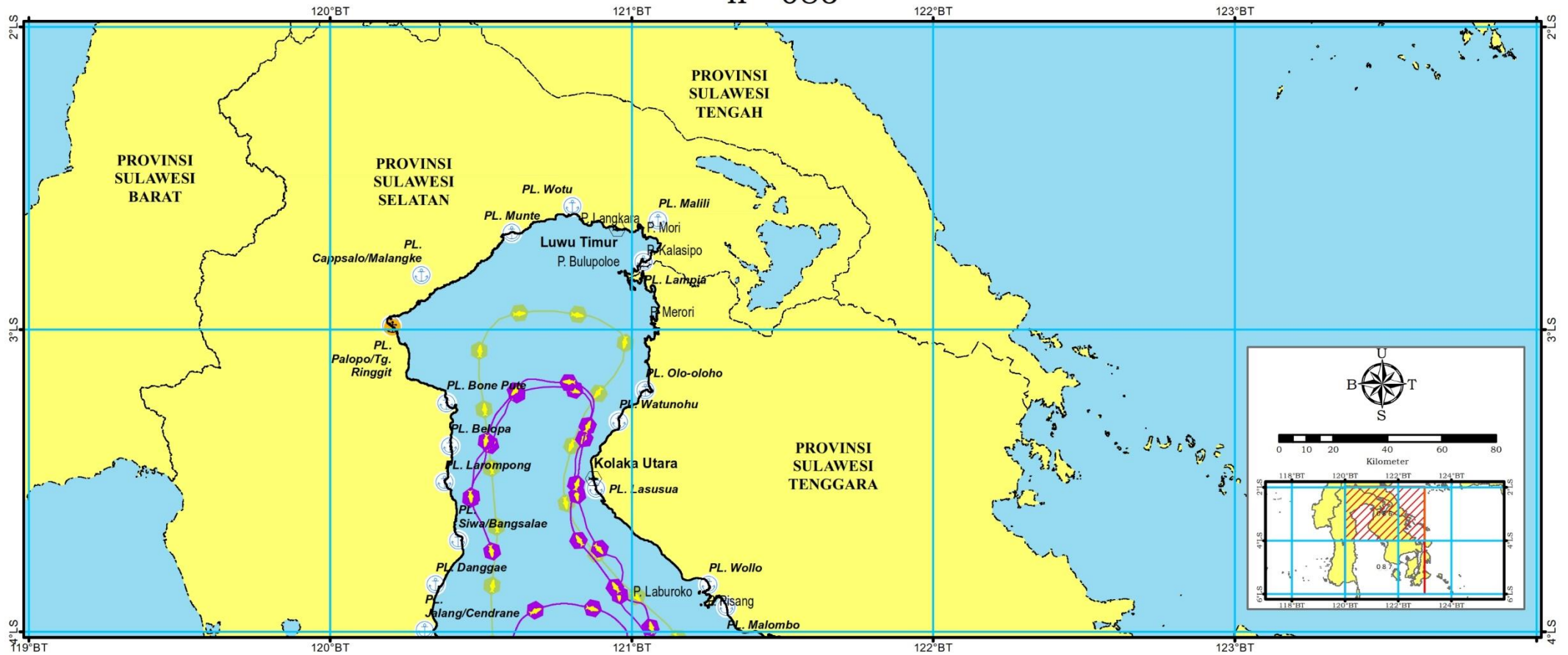
PETA INDEKS





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 086

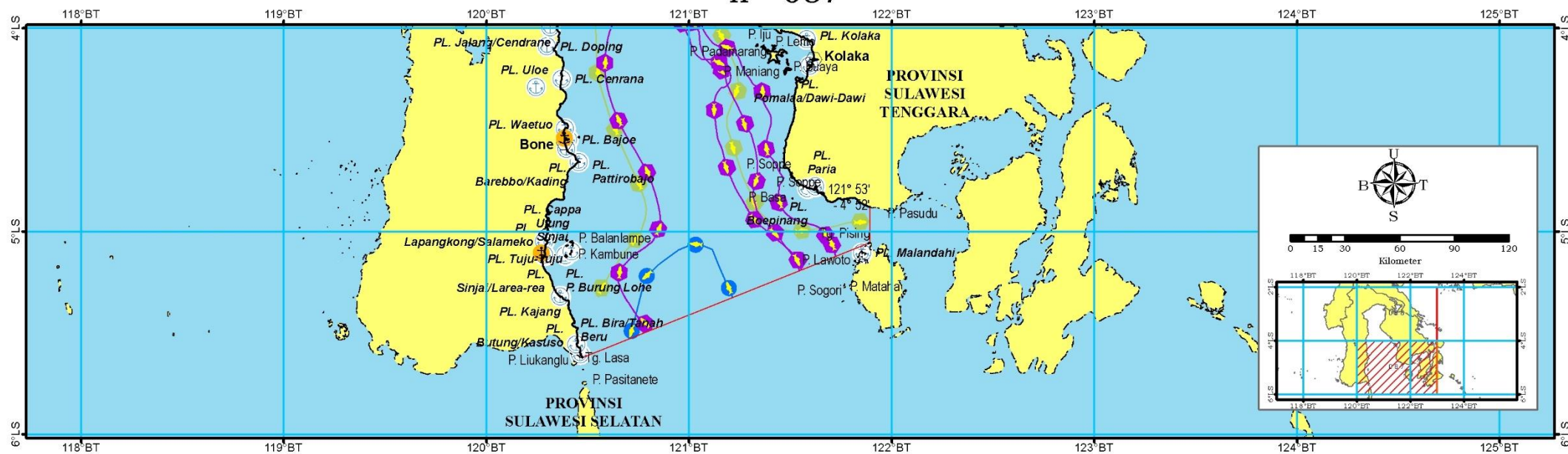






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 087



Salinan sesuai dengan aslinya



KEPANTUNAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,

Dydia Silvanna Djaman

SK No 068251 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO